

LAPORAN POKOK-POKOK KESIMPULAN
RAPAT PANSUS RPJMD DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
Pertemuan V – Senin, 16 Juni 2025

I. PENDAHULUAN

Rapat Pansus kelima ini difokuskan pada pembahasan dan pengesahan tiga **Prioritas Pembangunan Daerah** dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, yaitu:

1. Menjamin Stabilitas Sosial, Politik dan Keamanan yang Kondusif
2. Pertanian Maju dan Kemandirian Pangan
3. UMKM Maju dan Ketenagakerjaan yang Unggul

II. PRIORITAS 3 – STABILITAS SOSIAL, POLITIK, DAN KEAMANAN YANG KONDUSIF

A. Substansi dan Isu Strategis

- Kesbangpol Luwu Timur menjadi **leading sector** pada prioritas ini.
- Fokus utama: penanggulangan narkoba, stabilitas ormas, pencegahan konflik sosial, dan penguatan wawasan kebangsaan.

B. Permasalahan dan Rekomendasi

- **Maraknya kasus narkoba:** 87 kasus (2024) dan 52 kasus (Januari-Mei 2025).
- Anggaran penanggulangan narkoba sebelumnya hanya **Rp 100 juta per tahun**, dinaikkan dalam RPJMD menjadi **Rp500-800 juta per tahun**, namun dinilai **belum memadai**.
- **Perda No. 1 Tahun 2024** sudah ada (tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah), namun **Perbup pendukung belum diterbitkan**.
- Usulan konkrit dari DPRD:
 - Program **deteksi dini dan edukasi pelajar**, rehabilitasi, dan pemetaan wilayah rawan narkoba.
 - **Satgas Anti-Narkoba berbasis desa dan intelijen sosial masyarakat**.
 - Dorongan **penambahan anggaran hingga Rp 1 miliar per tahun untuk penanggulangan dan pemberantasan narkoba di Luwu Timur**.
 - Keterlibatan aktif tokoh adat, agama, pemuda, dan aparat desa.
- **Rekomendasi Pansus:**
 - Badan Kesbangpol harus merancang program yang **sistematis, terukur, dan berbasis data**.
 - **Bupati dan BKAD perlu menambah anggaran** untuk pemberantasan narkoba.
 - **Prioritas 3 disahkan** (diketuk palu).

III. PRIORITAS 4 – PERTANIAN MAJU DAN KEMANDIRIAN PANGAN

A. Program Strategis dan Anggaran

1. **Program Pupuk Gratis Plus**
 - Target: subsidi penuh (zero rupiah bagi petani) → pupuk subsidi pusat + daerah.
 - Anggaran: **Rp 64 miliar per tahun** (untuk dua kali musim tanam padi).
 - Ditambah dengan bibit unggul: total anggaran mencapai **Rp 92 miliar per tahun**.
2. **Bantuan benih jagung dan holtikultura:**
 - Jagung: Rp 2,1 miliar per tahun.
 - Holtikultura: Rp 450 juta per tahun.
3. **Pencetakan sawah baru** (program pusat):
 - Target nasional: 10.000 ha → 2025: direalisasikan tahap awal 700 ha di Mahalona.
4. **Revitalisasi jaringan irigasi & logistik:**
 - Anggaran: Rp 25 miliar per tahun.
5. **Bantuan alsintan (alat mesin pertanian):**
 - Anggaran: Rp 5,9 miliar per tahun.
6. **Baruga Tani, pasar agro, dan sistem logistik terpadu**
 - Perlu lintas OPD dan melibatkan swasta (komoditas unggulan: padi, jagung, lada, kakao).

B. Permasalahan dan Catatan DPRD

- Masih lemahnya **pengawasan pasca-bantuan**, termasuk potensi penjualan alsintan.
- Penyuluh pertanian **minim turun lapangan**, laporan langsung ke pusat, pengawasan longgar.
- **Kesejahteraan buruh tani belum menjadi fokus**, padahal banyak pemilik lahan tidak menanam sendiri.
- **Mandatory spending pupuk gratis** harus masuk dalam BKK Desa ($\pm$ Rp 400 juta per desa).
- **Pemerataan data penerima bantuan** sangat penting untuk menghindari ketimpangan.
- **Pengembangan komoditas lokal non-beras** perlu dipacu.

C. Perikanan

- Bantuan sarpras budidaya rumput laut dan alat melaut:
 - 13.000 ha empang dan 900 ha laut.
 - 175 kelompok tani rumput laut dan 160 kelompok nelayan.
 - Anggaran: Rp 22 miliar per tahun.
 -

Rekomendasi Pansus:

- Perlu pengawasan ketat dan sistem audit partisipatif.
- Integrasikan data petani dan nelayan ke dalam sistem terpadu.
- **Prioritas 4 disahkan** (diketuk palu).

IV. PRIORITAS 5 – UMKM MAJU DAN KETENAGAKERJAAN UNGGUL

A. UMKM dan Sertifikasi

- Total UMKM di Luwu Timur: **21.784**
 - UMKM binaan Dinas Koperindag hingga 2025: **824 UMKM**
 - UMKM tersertifikasi halal hingga 2024: **182 UMKM**
 - Target tambahan: 152 UMKM tersertifikasi halal hingga 2029
- **Program sertifikasi halal dan izin usaha gratis:**
 - Anggaran sertifikasi halal: Rp 300 juta per tahun
 - Bantuan izin usaha: Rp 2,1 miliar per tahun

B. Bantuan Modal

- Bantuan maksimal Rp50 juta per UMKM melalui kompetisi proposal.
- Tahap awal hanya 10 UMKM per tahun, usulan: minimal **11 UMKM (1 per kecamatan per tahun)**.
- Anggaran: Rp 2,7 miliar per tahun.
- Disepakati pemberian bantuan dalam bentuk uang/peralatan sesuai proposal.

C. Program Ketenagakerjaan

1. **Bengkel Usaha Komunitas (BLK Komunitas):**
 - Target awal: 3 BLK Komunitas di 3 kecamatan (dari 11 kecamatan).
 - Anggaran dari Kemenaker RI: Rp 1 miliar per kecamatan.
2. **Entrepreneur 1000 orang/tahun:**
 - Target realistis: 300 orang per tahun → Rp 600 juta per tahun.
 - Mitra pelatihan: Vokasi Bantaeng dan PT Vale Indonesia.
3. **Sekolah Vokasi:**
 - Rencana pendirian di 5 kecamatan.
4. **Platform digital kerja, pelatihan, dan PKOD:**
 - Fasilitasi pencari kerja dan konektivitas industri.
5. **Lutim Mart:**
 - Dirancang dalam bentuk retail modern lokal.
 - Lokasi di Tarengge, selesai paling lambat 2028.

D. Rekomendasi DPRD

- **Jumlah penerima bantuan UMKM harus ditambah.**
- **Perlu sistem kontrol dan monitoring penerima bantuan.**
- Integrasi program dengan **kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal.**
- Evaluasi dan penguatan regulasi tenaga kerja asing (IMTA & retribusi).
- **Prioritas 5 disahkan** (diketuk palu).

V. REKOMENDASI UMUM PANSUS

1. **Penambahan anggaran signifikan** untuk program pemberantasan narkoba, target hingga Rp 1 miliar per tahun.
2. Dorong percepatan terbitnya **Perbup turunan Perda Narkotika**.
3. Perkuat sistem pendataan dan evaluasi berbasis indikator terukur untuk pertanian, UMKM, dan ketenagakerjaan.
4. Integrasi program antar-OPD dan sinergi pusat-daerah harus menjadi prinsip pelaksanaan RPJMD.
5. Seluruh **Tabel Program (Tabel 3.9)** perlu ditambahkan kolom **anggaran dan *leading sector***.

VI. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Ketua Pansus. Ketiga prioritas yang dibahas disahkan melalui forum, dan masukan-masukan kritis dari DPRD akan menjadi bagian integral dari dokumen rekomendasi dan finalisasi RPJMD 2025–2029 Kabupaten Luwu Timur.